



RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Jl. Presiden K.H. Abdurrahman Wahid No. 161 Jombang 61419
Telp. (0321) 861881, Fax. -, e-mail: dppkb.pppa@jombangkab.go.id

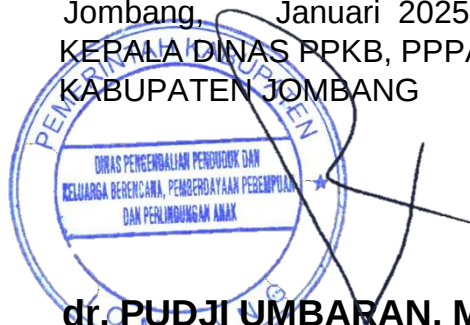
KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan sekaligus sebagai landasan dalam mewujudkan Visi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang Tahun 2025.

Berbagai tantangan dan harapan dalam kurun waktu 1 tahun diakomodasikan dalam suatu perencanaan kinerja, serta dipersepsikan dalam bentuk kebijakan. Tantangan ke depan akan semakin kompleks, sehingga aktualisasi kebijakan strategis sebagai tindak lanjut dari rencana yang telah disusun, sangat perlu menjadi komitmen bersama untuk mencapai hasil optimal. Harapan masyarakat yang semakin tinggi seyogyanya cepat direspon dengan pembangunan sistem, peningkatan kinerja dan kerja keras. Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam melaksanakan Pengendalian Penduduk melalui Program Keluarga Berencana, sehingga pada tahun-tahun berikutnya Jombang menjadi Kabupaten Keluarga Berencana.

Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat diwujudkan. Semoga Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Aamiin Yaa Robbal Alamiin.

Jombang, Januari 2025
KEPALA DINAS PPKB, PPPA
KABUPATEN JOMBANG



dr. PUDJI UMBARAN, M.Kp
Pembina Utama Muda
NIP. 196804102002121006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I..... 1

PENDAHULUAN..... 1

1.1 LATAR BELAKANG..... 1

1.2 LANDASAN HUKUM..... 4

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN..... 5

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 6

BAB II..... 11

PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2025 11

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI TRIBULAN II DAN
CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH..... 11

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH22

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
SKPD29

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....38

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN MASYARAKAT.....63

BAB III 64

TUJUAN,SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN..... 64

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 64

3.1.1 Kemeneterian PPPA 64

3 1.2 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)66

3.1.3 Kebijakan Daerah..... 70

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PENYESUAIAN RENJA SKPD..... 71

BAB IV 90

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	90
BAB V	108
P E N U T U P	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang telah tertuang pada rencana strategis dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7/09 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005 - 2025. Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta penganggaran menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang. Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 juga dirumus untuk mensinkronkan dalam rangka menunjang tujuan dan sasaran Kabupaten Jombang kepala daerah pada tahun 2025 dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengakomodir urusan wajib Non pelayanan dasar. Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2025 dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan pemerintah daerah pada tahun 2025

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) memuat kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Rancangan Kerja Tahun 2025-2026

Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Dalam pasal 201 ayat (3) disebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022, sedangkan pasal 201 ayat (9) menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Menindaklanjuti hal tersebut Menteri Dalam Negeri Menyusun Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023, pada Diktum 1 dan 2 disebutkan bahwa :

- 1) Pemerintah daerah agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024- 2026;
- 2) Seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2024-2026;
- 3) Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2024-2026 akan digunakan Pj. Kepala Daerah sebagai Pedoman

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;

Rancangan Kerja Tahun 2025-2026

- 4) Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 dan Renstra PD tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Perkada.

Di Provinsi Jawa Timur ada 24 daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir tahun 2024, yang terdiri dari :

- a) 7 daerah dengan periode RPJMD yang selesai di tahun 2024 (2019-2024) yang nantinya diwajibkan menyusun RPD
- b) 17 daerah yang RPJMD dengan periode 2021-2026 dimana dalam pelaksanaannya pada tahun 2024-2026 akan dilanjutkan oleh Pj Kepala Daerah namun masih menunggu dari kebijakan politik kedepan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Jombang yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja PD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan PD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program PD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra PD.

Dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor

050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah menuntut pemerintah daerah fokus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangkan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Penetapan tolok ukur dalam pendekatan ini mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengukuran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Tema pembangunan daerah pada tahun 2024 yaitu Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menetapkan ***Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.***

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kementrian/ Lembaga pemerintah non kementrian menetapkan hasil pemetaan pemerintahan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintah daerah setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Kementrian yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Rancangan Kerja Tahun 2025-2026

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 162 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang;
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja PPKBPPPA Kabupaten Jombang Tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah untuk :

1. Untuk merumuskan program dan kegiatan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Jombang selama tahun 2025

2. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Nasional.
4. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan permendagri nomor 86 tahun 2017, penyajian Rencana Kerja Dinas PPKBPPPA Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Tribulan II Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Tribulan II (n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n+1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis Indikator yang dikaji,

disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan.

2.3 Isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Pada sub bab ini berisikan uraian mengenai penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah sesuai dengan Perda dan Perbup :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam sub bab ini berisikan uraian mengenai dukungan PD sesuai proses bisnis dalam mendukung sasaran daerah yang ada di Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan penemuan-penemuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besaran berbeda

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi/asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, yakni melalui usulan pemangku kepentingan dalam usulan prioritas kecamatan dan, usulan melalui forum renja Perangkat Daerah
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, diantaranya terkait dengan :
 - ξ Pencapaian SDGs
 - ξ Pertumbuhan ekonomi
 - ξ Penurunan tingkat pengangguran terbuka
 - ξ Pengentasan kemiskinan
 - ξ Penurunan stunting
 - ξ Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender (KKB)
 - ξ Pencapaian NSPK dan SPM

- ξ Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
 - ξ Pemerataan Pembangunan
 - ξ Pengembangan daerah terisolir, dsb
- b) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- ξ Jumlah program dan jumlah kegiatan;
 - ξ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu)
 - ξ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan

BAB II

PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI TRIBULAN II DAN
CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Secara umum pada tahun 2025, Dinas PPKBPPPA Kabupaten Jombang melaksanakan 8 (Delapan) program, 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan dan 43 (Empat Puluh Tiga) sub kegiatan. Dinas PPKBPPPA pada tahun 2025 mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 6.290.998.256 (APBD) dan terealisasi sebesar Rp. - atau 0% Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel berikut ini

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-
2.08.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	296.106.500	-	-
2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	117.582.250	-	-

Rancangan Kerja
Tahun 2025-2026

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	117.582.250	-	-
2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	83.374.750	-	-
2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	83.374.750	-	-
2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	95.149.500	-	-
2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	95.149.500	-	-
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	255.182.235		
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	18.254.450	-	-
2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.254.450	-	-

2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	53.355.000	-	-
2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	45.105.000	-	-
2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.250.000	-	-
2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.947.500	-	-
2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.947.500	-	-
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	147.234.500		
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	119.630.500		

Rancangan Kerja
Tahun 2025-2026

2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	30.900.000	-	-
2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	88.730.500	-	-
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	27.604.000	-	-
2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.604.000	-	-
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS	126.954.000	-	-

Rancangan Kerja
Tahun 2025-2026

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
ANAK			
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	38.907.000	-	-
2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan /Program/Kegiatan Pencegahan KTA	38.907.000	-	-
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.324.000	-	-
2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.074.000	-	-
2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	8.250.000	-	-
2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.723.000		
2.08.07.2.03.0005 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.723.000	-	-

Rancangan Kerja
Tahun 2025-2026

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.796.674.406	-	-
2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.591.193	-	-
2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.640.000	-	-
2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.951.193	-	-
2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.742.494.376	-	-
2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.537.560.626	-	-
2.08.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	201.234.000	-	-
2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.699.750	-	-
2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.600.000	-	-

2.08.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.600.000	-	-
2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.759.200	-	-
2.14.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.264.950	-	-
2.14.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.193.250	-	-
2.14.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.800.000	-	-
2.14.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.550.000	-	-
2.14.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.704.000	-	-
2.14.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.247.000	-	-
2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.078.000		
2.08.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	49.078.000	-	-
2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.680.000	-	-
2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.200.000	-	-

Rancangan Kerja
Tahun 2025-2026

2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.080.000	-	-
2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	254.400.000	-	-
2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.471.637	-	-
2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	191.000.000	-	-
2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.621.637	-	-
2.08.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.850.000	-	-
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	40.948.900	-	-
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	40.948.900	-	-
2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	40.948.900	-	-
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	435.096.800	-	-
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	42.312.500	-	-

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	30.000.000	-	-
2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	12.312.500	-	-
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	209.840.000	-	-
2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	5.440.000	-	-
2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	204.400.000	-	-
2.14.03.2.0003 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	182.944.300	-	-
2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	147.944.300	-	-

Rancangan Kerja
Tahun 2025-2026

2.14.03.2.03.04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5.000.000	-	-
2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	30.000.000	-	-
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	360.426.200	-	-
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	141.047.300	-	-
2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	141.047.300	-	-
2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	219.378.900	-	-

2.14.04.2.02.0003 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	219.378.900	-	-
Jumlah	6.458.623.541	-	-

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Jombang merupakan pengkajian teradap capaian kinerja pelayanan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Jombang dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Jombang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rancangan Kerja Tahun 2025-2026

Penyelenggaraan pelayanan Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Jombang pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai pelaksana urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang. Dinas PPKBPPPA mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kondisi penyelenggaraan pelayanan Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Jombang dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain

1. Mekanisme kelembagaan

Kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang berdasarkan pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang

2. Mekanisme pelaksanaan

Seiring diberlakukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bertujuan :

- a) Perlindungan terhadap Kekerasan: Melindungi perempuan dan anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan eksploitasi.
- b) Mendukung Korban: Memberikan dukungan fisik, psikologis, dan sosial kepada perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi.
- c) Pencegahan: Mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak melalui edukasi, kesadaran masyarakat, dan langkah-langkah preventif lainnya

- d) Penegakan Hukum: Mendorong penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.
- e) Pemberdayaan: Mendorong pemberdayaan perempuan dan anak-anak untuk dapat melindungi diri mereka sendiri dan mengatasi dampak traumatis dari kekerasan.
- f) Pelayanan Medis: Menyediakan akses terhadap pelayanan medis dan kesehatan bagi korban kekerasan.
- g) Keadilan Sosial: Mendorong perubahan sosial dan budaya yang menghilangkan diskriminasi dan ketidaksetaraan gender yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.
- h) Kerja Sama: Mendorong kerja sama antara berbagai lembaga, organisasi masyarakat, dan pihak terkait dalam penyelenggaraan layanan perlindungan.
- i) Penayadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak serta pentingnya melibatkan seluruh masyarakat dalam upaya pencegahan dan perlindungan.

Kemudian Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, penyelenggaraan pengendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki tujuan:

- a. Pengendalian Pertumbuhan Populasi: Mengendalikan pertumbuhan populasi agar sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan mencegah kemungkinan tekanan berlebihan pada lingkungan, ekonomi, dan layanan sosial.
- b. Kesejahteraan Keluarga: Meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan memberikan akses terhadap informasi dan layanan KB sehingga pasangan dapat merencanakan keluarga mereka sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang mereka miliki.
- c. Kesehatan Reproduksi: Meningkatkan kesehatan reproduksi wanita dan mengurangi risiko kesehatan terkait kehamilan yang tidak diinginkan atau terlalu sering.
- d. Peningkatan Kualitas Hidup: Meningkatkan kualitas hidup individu dan keluarga dengan memungkinkan mereka untuk mengatur jumlah

Rancangan Kerja Tahun 2025-2026

anak yang mereka miliki, memperpanjang jarak antara kelahiran anak, dan merencanakan keluarga dengan bijak.

- e. Pengurangan Kemiskinan: Kontribusi untuk mengurangi kemiskinan dengan mengurangi tekanan ekonomi yang dihasilkan oleh keluarga yang memiliki banyak anak.
- f. Peningkatan Pendidikan: Meningkatkan akses perempuan dan keluarga terhadap pendidikan dan pengembangan diri dengan memungkinkan mereka untuk merencanakan keluarga dan mengatur kehamilan sesuai dengan rencana mereka.
- g. Peningkatan Kesejahteraan Anak: Mengurangi angka kematian bayi dan balita, serta meningkatkan kesejahteraan anak dengan memberikan mereka akses ke sumber daya yang cukup, termasuk nutrisi dan perhatian yang cukup dari orang tua.
- h. Peningkatan Kesetaraan Gender: Mendukung kesetaraan gender dengan memberikan perempuan kontrol atas keputusan reproduksi mereka, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik tentang keluarga dan karier mereka.
- i. Perlindungan Kesehatan Ibu: Meningkatkan kesehatan ibu dengan mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan melalui perencanaan keluarga yang bijak.
- j. Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program KB dan peningkatan kesadaran tentang manfaat pengendalian penduduk dan KB.

Perencanaan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya. Dalam 5 (lima) tahun pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) telah menghasilkan berbagai kemauan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pelayanan di daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Hasil Kerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Jombang telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan, antara lain :

- a. Dokumen rencana pembangunan jangka menengah terkait urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Dokumen rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang tahun 2025-2026;
- c. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2025;
- f. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perbaikan mutu pelayanan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mulai dari menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat hingga menuangkan dalam perencanaan program dan kegiatan rencana kerja;
- g. Evaluasi dan revaluasi pelaksanaan perencanaan baik perencanaan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jangka menengah maupun tahunan melalui rapat kerja dan koordinasi dengan pusat provinsi dan kabupaten/kota untuk penyusunan rencana kerja.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Jombang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan

Rancangan Kerja Tahun 2025-2026

keluarga;

- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;
- g. Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. Pelaksanaan pelayanan KB;
- i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- k. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- l. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dengan realisasi pelaksanaannya, untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan target sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai target kinerja yang telah

Rancangan Kerja
Tahun 2025-2026

ditetapkan dalam renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang adalah Indikator Sasaran OPD. Indikator Sasaran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang Tahun 2025 sebagai berikut:

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	TARGET KINERJA, TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatnya Peserta KB Aktif	Persentase Peserta KB Aktif	75,25%	75,50%	75,75%
		Menurunnya Unmeet Need	Persentase Unmeet Need	10,7%	10,5%	10,4%
Terlaksananya Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Pelaksanaan Layanan Komprehensif Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	100%
		Meningkatnya Anak yang memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase Anak yang memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	100%
Meningkatnya Keadilan dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya ARG	Persentase ARG	74,25%	74,50%	74,75%
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	A	A	A

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

1. Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kerja perubahan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksestabilitas prioritas pelaksanaan, dapat dioperasikan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Perencanaan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pelayanan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang sebagai unsur pelayan publik, diharapkan mampu melaksanakan perencanaan pelayanan dengan baik. Dalam mencapai tujuan dan sasaran tidak bias terlepas dari faktor-faktor lingkungan strategis yang seringkali juga disebut faktor internal dan eksternal. Maka dapat dilakukan analisa lingkungan. Analisa ini terdiri dari analisa internal dan eksternal. Analisa Internal meliputi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), sedangkan analisa eksternal terdiri atas tantangan (opportunity) dan peluang (treaths).

Analisis SWOT yang digunakan meliputi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam

organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang. Sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana cara kita memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk meminimalisasi/meniadakan hambatan dan ancaman, agar dapat digunakan untuk menganalisa atau menentukan isu-isu strategis yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dalam mengatasi masalahmasalah yang timbul terutama dalam perencanaan pelayanan publik di Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 1 tahun.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang. Sebagai OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dituntut untuk segera menyesuaikan dengan kondisi OPD-OPD yang lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang ini sekaligus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, karena penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan memegang peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas-tugas operasional di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan diperlukan langkah-langkah terobosan untuk mewujudkan manajemen penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dengan tertib, efisien dan efektif. Dengan melihat gambaran umum di atas serta memperhatikan kondisi yang berkembang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang saat ini, maka dapat digambarkan kondisi internal organisasi (strength dan weakness) dan kondisi eksternal (opportunity dan treathment) yang dapat mempengaruhi tingkat capaian tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) Dinas

Rancangan Kerja Tahun 2025-2026

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang akan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi kinerja dinas tersebut. Berikut adalah contoh analisis SWOT untuk Dinas PPKB Kabupaten Jombang:

Strengths (Kekuatan):

1. Peraturan Bupati Jombang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang
2. Tenaga Ahli: Dinas PPKB Kabupaten Jombang mungkin memiliki staf yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
3. Suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif dan Terjalinnya sistem koordinasi antar seluruh komponen Dinas PPKBPPPA Kabupaten Jombang serta lintas OPD yang harmonis
4. Kerjasama dengan Organisasi Non-Pemerintah dan Stakeholders
5. Akses ke Sumber Daya: Mungkin memiliki akses ke sumber daya dan anggaran yang cukup untuk melaksanakan program-programnya.

Weaknesses (Kelemahan):

2. Kurangnya Dana: Dinas PPKB mungkin terbatas oleh anggaran yang kurang mencukupi, yang dapat membatasi pelaksanaan program-programnya.
3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Masyarakat mungkin belum sepenuhnya menyadari pentingnya perencanaan keluarga, kesetaraan gender, dan perlindungan anak, yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.
4. Ketidaksetaraan Gender: Masih ada ketidaksetaraan gender yang perlu diatasi, seperti perempuan yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan pekerjaan.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana

6. Terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur dalam pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Opportunities (Peluang):

1. Perubahan Perilaku: Peluang untuk mengubah perilaku masyarakat melalui edukasi dan kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga dan perlindungan anak.
2. Peningkatan Anggaran: Peluang untuk mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah atau donatur untuk memperluas program-program.
3. Teknologi dan Komunikasi: Penggunaan teknologi dan media sosial dapat digunakan untuk mencapai lebih banyak orang dan memberikan informasi yang lebih luas.
4. Kemitraan Strategis: Potensi untuk menjalin kemitraan lebih lanjut dengan organisasi non-pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta untuk memperkuat program-program.

Threats (Ancaman):

1. Perubahan Kebijakan: Ancaman perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi pendanaan atau prioritas program.
2. Resistensi Budaya: Masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional dan budaya yang mungkin tidak mendukung perencanaan keluarga dan kesetaraan gender.
3. Isu Stigma: Ancaman stigma sosial terhadap layanan KB dan isu-isu sensitif lainnya yang dapat menghambat partisipasi masyarakat.
4. Ketidakpastian Ekonomi: Ketidakpastian ekonomi dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan KB.

Analisis SWOT seperti ini dapat membantu Dinas PPKB Kabupaten Jombang untuk merencanakan strategi yang lebih efektif, memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan program-program mereka.

2) Permasalahan Dan Hambatan Dalam Menyelenggarakan Tugas Dan

Fungsi SKPD

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang mempunyai permasalahan dan hambatan yaitu :

- Masih Banyak Masyarakat yang belum terlibat program Keluarga Berencana
- Belum terlaksananya Kesetaraan Gender di berbagai sektor masyarakat
- Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

3)Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Daerah

Program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang yang dilaksanakan dalam rangka mencapai Sustainable Development Goals (SDGS) berfokus pada beberapa target SDGS yang relevan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan perempuan, anak-anak, dan pengendalian pertumbuhan populasi. Berikut beberapa contoh program dan kegiatan yang mendukung SDGS:

1. Program Perencanaan Keluarga: Dinas PPKB Kabupaten Jombang mungkin menjalankan program perencanaan keluarga yang bertujuan untuk mendukung Target SDGS 3.7 (Menyediakan akses universal ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang berkualitas).
2. Pemberdayaan Perempuan: Program pemberdayaan perempuan dapat mendukung Target SDGS 5 (Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan). Ini mencakup pendidikan, pelatihan, dan dukungan bagi perempuan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
3. Perlindungan Anak: Program perlindungan anak mendukung Target SDGS 16.2 (Mengakhiri kekerasan terhadap anak) dan Target SDGS 16.9 (Memberikan identitas hukum kepada semua, termasuk kelahiran yang didaftarkan).

4. **Penyuluhan Keluarga:** Program penyuluhan keluarga yang mencakup isu-isu seperti perencanaan keluarga, gizi, dan perawatan anak dapat mendukung Target SDGS 2.2 (Mengakhiri kelaparan, mencapai gizi yang baik, meningkatkan nutrisi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan).
5. **Pendidikan Seksual:** Pendidikan seksual yang diberikan oleh Dinas PPKB mendukung Target SDGS 4.7 (Mengamalkan pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan peluang pendidikan bagi semua).
6. **Kemitraan dan Kolaborasi:** Dinas PPKB dapat menjalin kemitraan dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga swasta untuk mendukung berbagai Target SDGS, termasuk Target SDGS 17 (Meningkatkan pelaksanaan kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan).
7. **Kampanye Kesadaran Masyarakat:** Kampanye kesadaran masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas PPKB dapat mendukung berbagai Target SDGS, terutama yang berkaitan dengan pengurangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender.
8. **Peningkatan Akses ke Layanan Kesehatan Reproduksi:** Dinas PPKB dapat memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai ke layanan kesehatan reproduksi, seperti pelayanan antenatal dan pasca persalinan, untuk mendukung Target SDGS 3.1 (Mengakhiri tingkat kematian maternal).
9. **Pengelolaan Pertumbuhan Populasi:** Program pengendalian pertumbuhan populasi dan perencanaan keluarga dapat mendukung Target SDGS 11.3 (Mengurangi dampak negatif perubahan lingkungan).
10. **Pemberdayaan Masyarakat:** Program-program pemberdayaan masyarakat dapat membantu mencapai berbagai Target SDGS, termasuk Target SDGS 1 (Mengakhiri kemiskinan), Target SDGS 4 (Mengakhiri ketidaksetaraan dalam pendidikan), dan Target SDGS 10 (Mengurangi

Rancangan Kerja Tahun 2025-2026

ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara).

Dalam melaksanakan program dan kegiatan ini, Dinas PPKB Kabupaten Jombang berkontribusi pada pencapaian beberapa SDGS yang relevan dengan fokus pada kesejahteraan perempuan, anak-anak, dan pengendalian pertumbuhan populasi dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

4. Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan DPPKBPPPPA

Terlaksananya tugas pokok fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang berdampak terhadap capaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah, dengan kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang adalah **Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan, Meningkatnya Kesenjangan dan Keadilan Gender dan Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan**

Dalam melaksanakan tugas tersebut terdapat tantangan dan peluang yang teridentifikasi berikut:

Tantangan :

1. Adanya mutasi sumber daya yang terlatih ke Instansi lain
2. Tidak adanya pergantian dari aparatur yang telah purna tugas secara cepat dan tepat
3. Permasalahan kependudukan dalam konteks Keluarga Berencana masih belum menjadi permasalahan prioritas di kabupaten Jombang
4. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga belum bisa diterapkan dengan cepat disemua fasilitas pelayanan kesehatan, karena belum semua pengelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan memberikan komitmen terselenggaranya pelayanan KB.
5. Terbatasnya SDM, dengan adanya 306 Desa yang dibina oleh 73 Penyuluh Keluarga Berencana sehingga beban kerja 4 dibanding 1

Peluang

1. Terbentuknya koalisi kependudukan.
2. Sinergitas program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Visi Kabupaten Jombang periode 2025-2026.
3. Adanya kerjasama (MOU) dengan tempat pelayanan KB.

- 4. Masih adanya hubungan koordinasi dengan BKKBN berupa program dan pendanaan.
- 5. Sarana Prasarana yang memadai.

2.5 Isu-isu strategis dan prioritas yang direncanakan

Kabupaten Jombang mengusung tema pembangunan tahun 2024-2026 adalah “Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur Berkelanjutan Yang mendorong Industri Agribisnis dan Pembangunan Wilayah” kabupaten Jombang tahun 2025, yaitu:

- 1. Peningkatan kualitas pelayanan public bagi masyarakat, keamanan dan ketentraman umum
- 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk mewujudkan SDM unggul serta pengentasan kemiskinan ekstrem
- 3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung peningkatan investasi daya saing dan produk unggulan daerah

Permasalahan, isu strategis, dan arah kebijakan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Jombang pada tahun:

Permasalahan	Isu Strategis	Arah Kebijakan
Masih banyaknya masyarakat Jombang yang belum berpartisipasi dalam Program Keluarga Berencana	Peningkatan Kesertaan Program Keluarga Berencana	1) Penyuluhan Program dan Pembinaan tenaga lini lapangan 2) Konseling PPKS 3) Kolaborasi Pelayanan KB dengan Faskes 4) Penguatan Pokja Kampung KB dan Ketahanan Keluarga 5) Pelaksanaan Advokasi KIE Bangga Kencana 6) Pencatatan dan Pendampingan Stunting
Maraknya kasus kekerasan terhadap	Peningkatan Layanan Perlindungan Perempuan dan	1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu perlindungan perempuan dan anak. 2) Meningkatkan ketersediaan dan

Rancangan Kerja
Tahun 2025-2026

perempuan dan anak	Anak	aksesibilitas layanan perlindungan bagi perempuan dan anak di Kabupaten Jombang. 3) Pelaporan dan Penanganan Kasus dengan Membangun sistem pelaporan kasus dan penanganan yang cepat dan efektif untuk melindungi korban.
Kurangnya representasi dan partisipasi perempuan pada sektor-sektor strategis di masyarakat.	Peningkatan Pengarusutamaan Gender di Setiap Sektor Masyarakat	1) Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial. 2) Kampanye Kesetaraan Gender: Mengadakan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender di masyarakat. 3) Pelatihan Kepemimpinan Perempuan: Memberikan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan dan mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik dan sosial.

Rancangan Rencana Kerja 2025

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

RANCANGAN AWAL RKPD DAN KESESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target Renstra	
					2025	
					K	Rp
			3	4	5	6
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			Persentase data kecamatan yang ter update tepat waktu	Persen	94	40.948.900
	2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kecamatan dengan Data dan Informasi Keluarga Terupdate	Persen	86	40.948.900
		2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	Dokumen	21	40.948.900
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			Pesentase pertumbuhan Akseptor KB Aktif	Persen	0,5	435.096.800

Rancangan Rencana Kerja 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target Renstra	
					2025	
					K	Rp
	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Persentase Akseptor KB Baru	Persen	100	42.312.500
		2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE program Bangga kencana Melalui media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	5	30.000.000
		2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	2	12.312.500

Rancangan Rencana Kerja 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target Renstra	
					2025	
					K	Rp
	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Persentase Kader IMP yang Aktif	Persen	100	209.840.000
		2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	2044	5.440.000
		2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	1	204.400.000

Rancangan Rencana Kerja 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target Renstra	
					2025	
					K	Rp
	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Akseptor KB Aktif	Persen	71	182.944.300
		2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	3023	147.944.300
		2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	5	5.000.000

Rancangan Rencana Kerja 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target Renstra	
					2025	
					K	Rp
		2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	5	30.000.000
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			Presentase Perkawinan pertama wanita usia < 20 tahun	Persen	9,64	360.426.200
	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Kelompok (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang aktif	Persen	100	141.047.300
		2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	4	141.047.300

Rancangan Rencana Kerja 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target Renstra	
					2025	
					K	Rp
	2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	persen	100	219.378.900
		2.14.04.2.02.0003 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	101	219.378.900

Rancangan Rencana Kerja 2025

		Ekonomi Keluarga/UPPKS				
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			Persentase PD yang melaksanakan kebijakan perlindungan tindak kekerasan pada perempuan	Persen	100	87.556.950
	2.08.03.2.01.0002 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat daerah yang aktif melaksanakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	18.254.450
		2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	53	18.254.450
	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase kasus tindak kekerasan pada perempuan yang dilayani sesuai SPM	Persen	100	53.355.000

Rancangan Rencana Kerja 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target Renstra	
					2025	
					K	Rp
		2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	42	45.105.000
		2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	6	8.250.000
	2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDM lembaga yang mampu menyediakan layanan perlindungan perempuan	Persen	100	15.947.500

Rancangan Rencana Kerja 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target Renstra	
					2025	
					K	Rp
		2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	55	15.947.500
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			Persentase Desa Layak Anak	Persen	100	147.234.500
	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang melaksanakan pemenuhan hak anak	Persen	100	119.630.500
		2.08.06.2.01.0001 Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	37	30.900.000

Rancangan Rencana Kerja 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target Renstra	
					2025	
					K	Rp
		2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	88.730.500
	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga PHA yang terlatih	Persen	100	27.604.000
		2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	27.604.000

Rancangan Rencana Kerja 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target Renstra	
					2025	
					K	Rp
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			Persentase Kasus Tindak Kekerasan Pada Anak yang terselesaikan	Persen	100	126.954.000
	2.08.07.2.01 Pencegahan kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup daerah Kabupaten/Kota		Persentase institusi Pendidikan yang aktif melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak	Persen	100	38.907.000
		2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan Pendampingan Perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Orang	72	38.907.000
	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan koordinasi Tingkat daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyedia Layanan Kasus tindak kekerasan pada anak	Persen	100	53.324.000

Rancangan Rencana Kerja 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target Renstra	
					2025	
					K	Rp
		2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	40	45.074.000
		2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang	6	8.250.000
	2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase lembaga layanan anak yang aktif	Persen	100	34.723.000
		2.08.07.2.03.0005 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan bagi AMPK Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kegiatan	20	34.723.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target Renstra	
					2025	
					K	Rp
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persen	77,22	296.106.500
	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kelembagaan PUG	Persen	34	117.582.250
		2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	65	117.582.250
	2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik , Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase lembaga perempuan yang melaksanakan pemberdayaan perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persen	100	83.374.750

Rancangan Rencana Kerja 2024

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target Renstra	
					2025	
					K	Rp
		2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	23	83.374.750
	2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDM lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Persen	100	95.149.500
		2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kot	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	750	95.149.500

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan program /kegiatan tahun 2025 tidak ada usulan dari pemangku kepentingan, yakni pihak yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPKBPPPA dalam penyelenggaraan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hal ini dikarenakan semua sudah tercantum dalam rencana kerja yang disusun oleh Dinas PPKBPPPA Kabupaten Jombang.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.1.1 Kementerian PPPA

Kementerian PPPA merupakan bagian dari Kabinet Kerja periode 2019- 2024 yang akan melaksanakan agenda kerjanya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024. RPJMN merupakan himpunan dari aspirasi rakyat dan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden RI yang telah dijanjikan pada masa kampanye Pemilu Presiden RI pada tahun 2019.

Visi Kementerian PPPA

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Presiden tahun 2020-2025 yaitu: "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong". Untuk mewujudkan visi Presiden tersebut, ditempuh 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi Kemen PPPA harus memperhatikan visi dan misi Presiden. Memperhatikan visi Presiden terpilih tersebut, maka Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi Kemen PPPA tahun 2024

Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".

Misi Kementerian PPPA

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Penyusunan misi Kemen PPPA Tahun 2020-2025 disusun dengan mengacu pada misi Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), 3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan), dan 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya). Dalam rangka mewujudkan visi Kemen PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO;
2. peningkatan perlindungan anak; dan
3. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tujuan adalah penjabaran visi kementerian yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden (Bappenas, 2014). Perumusan tujuan Kemen PPPA didasarkan pada RPJMN tahun 2020-2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA, dan amanat peraturan perundang-undangan terkait. Penyusunan tujuan Kemen PPPA perlu memperhatikan Agenda pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

5. infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kemen PPPA mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai yaitu:

1. Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
5. Persentase ARG pada belanja langsung APBD

Penyusunan tujuan Renstra Kemen PPPA juga memperhatikan 5 arahan presiden, yaitu:

1. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan Anak;
3. penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. penurunan pekerja anak; dan
6. pencegahan perkawinan anak.

3.1.2 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Agenda pembangunan nasional selama 20 tahun telah di tuangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang merupakan acuan, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan keberlanjutan dari pembangunan sebelumnya. Saat ini Indonesia memasuki periode terakhir RPJMN IV tahun 2020-2025, dimana visi dan misi pembangunan dalam RPJPN menjadi landasan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2025 untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan

menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Lebih lanjut sebagaimana tertera dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, (2) Pembangunan Infrastruktur, (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Penyederhanaan Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi. RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, Visi Misi dan 5 (lima) arahan utama Presiden menjadi landasan utama RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan (Prioritas Nasional/PN). Dalam hal ini, BKKBN diberi mandat untuk turut berkontribusi secara langsung) Berkualitas dan dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Prioritas Nasional (PN) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing;

- 1) Program Prioritas (PP) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP; 1) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan 2) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
- 2) PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP; Kesejahteraan Sosial.
- 3) PP Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP;
 1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan 2) Percepatan Perbaikan Gizi
 2. Masyarakat. Dari Program Prioritas tersebut, BKKBN memiliki kontribusi terhadap KP Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi, dengan fokus strategi untuk :
 - a. peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi;
 - b. perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas sesuai karakteristik wilayah melalui penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah;

- c. peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif gender;
- d. peningkatan kompetensi PKB/PLKB;
- e. penguatan jejaring dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi khususnya praktik mandiri bidan, dokter swasta dan organisasi profesi; dan
- f. penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif.

b. Prioritas Nasional (PN) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan:

PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan KP Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini. Dari KP tersebut, BKKBN berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya:

- 1) Peningkatan pemahaman peran keluarga yang memiliki anak remaja dalam pengasuhan dan pembentukan karakter remaja.
- 2) Peningkatan penyampaian informasi dan edukasi pada remaja dalam pembentukan karakter.
- 3) Peningkatan pemahaman keluarga dalam pola pengasuhan dan pendampingan anak sejak usia dini.
- 4) Penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga guna meningkatkan kualitas keluarga.

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut:

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2025, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2025. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut:

c. meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:

- 1) Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
- 2) Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
- 3) Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
- 4) Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB.
- 5) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.
- 6) Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
- 7) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.

d. menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:

- 1) Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
- 2) Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
- 3) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
- 4) Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.

e. meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:

- 1) Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.

- 2) Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR.
- 3) Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
- 4) Peningkatan KB Pria.
- 5) Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).
- 6) Peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB

f. meningkatkan Advokasidan Penggerakan Program Bangsa Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:

- 1) Peningkatan penyebaran materi KIE Program Bangsa Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
- 2) Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.

g. memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:

- 1) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangsa Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah. Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuat pengelolaan Program Bangsa Kencana

h. meningkatkan Advokasidan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:

- 1)Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
- 2)Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.

i. memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:

- 1)Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah.
- 2)Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuatpengelolaan Program Bangga Kencana.
- 3)

3.1.3 Kebijakan Daerah

Beberapa hal yang menjadi langkah-langkah utama yang perlu dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dalam mendukung pencapaian tujuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional yang kemudian dituangkan dalam Program Kabupaten Jombang melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

No	Uraian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
4	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
5	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
7	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PENYESUAIAN RENJA SKPD

Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang adalah

1. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana;
3. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
4. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak;
5. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
			3
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			Persentase data kecamatan yang ter update tepat waktu

	2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan data dan informasi keluarga di Kecamatan yang ter update
		2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan
		2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya
		2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
		2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			Pesentase pertumbuhan Akseptor KB Aktif
	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Persentase Akseptor KB Baru
		2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK

		2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
		2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
		2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
		2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana

		Kearifan Budaya Loka	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
		2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Persentase Kader IMP yang Aktif
		2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
		2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB

	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Akseptor KB Aktif
		2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
		2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
		2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
		2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB
		2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan

		dan Jejaringnya	Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
	2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase kampung KB yang menjadi sasaran pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK
		2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
		2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			Presentase Perkawinan pertama wanita usia < 20 tahun

	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Kelompok (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang aktif
		2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
		2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia
		2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang

		Keluarga Akseptor (UPPKA)	mendapat biaya operasional kegiatan
	2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase kelompok BKB, BKR, BKL, PPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang Aktif
		2.14.04.2.02.0003 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
		2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			Persentase PD yang melaksanakan kebijakan perlindungan tindak kekerasan pada perempuan
	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat daerah yang aktif melaksanakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase kasus tindak kekerasan pada perempuan yang dilayani sesuai SPM
		2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan

		2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDM lembaga yang mampu menyediakan layanan perlindungan perempuan
		2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			Persentase Desa Layak Anak
	2.08.06.2.01 Pelebagaian PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha		Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang melaksanakan pemenuhan hak anak

	Kewenangan Kabupaten/Kota		
		2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
		2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga PHA yang terlatih
		2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

		Daerah Kabupaten/Kota	
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			Persentase Kasus tindak kekerasan pada anak yang terselesaikan
	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase institusi Pendidikan yang aktif melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak
		2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyedia Layanan Kasus tindak kekerasan pada anak
		2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan

		Kabupaten/Kota	
		2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan
	2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase lembaga layanan anak yang aktif
		2.08.07.2.03.0005 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	2.08.02.2.01 Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kelembagaan PUG
		2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi

		Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota
		2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota
		2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase lembaga perempuan yang melaksanakan pemberdayaan perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

		2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
		2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase SDM lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
		2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas

2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur
	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan
		2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur
	2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan
		2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan Persentase

			Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu
		2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
		2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
	2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
		2.14.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
	2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
		2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
		2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang

			Disediakan
		2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
		2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan
		2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
		2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

		2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
		2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi
		2.14.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka rencana kerja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Jombang tahun 2024 melakukan penyesuaian, sehingga mempunyai delapan (8) program, dua puluh lima (25) kegiatan dan lima puluh delapan (58) sub kegiatan. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Jombang, disajikan pada tabel berikut :

Rencana Kerja 2025

										Target Renstra	
Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Prog/Keg/Subkeg	Indikator	Formulasi	Satuan	2025	
										K	Rp
5					6		7		8	10	11
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Tersedianya data kecamatan y ter update tepat waktu	Persentase dak teacamatan yang ter update tepat waktu	Jumlah Data Kecamatan yang ter update tepat waktu -----X--1-00% Jumlah Data Kecamatan yang ter update	Persen	93	40.948.900
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan PengendaliaPnenduduk Cakupa Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan data dan informasi keluarga di Kecamat yang ter update	Jumlah Laporan data dan informasi keluarga di Kecamatan yang ter update	Jumlah Laporan data dan informa keluarga di Kecamatan yang taetreup	laporan	57	40.948.900
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Pembinaan da Pengawasan Penyelenggaraa Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran D Keluarga yang Dimanfaatkan	Dokumen	21	-
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informa Keluarga	Tersedianya Data dan Informa Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Jumlah Data dan Infor Keluarga yang Tersedia	Dokumen	21	-
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan da Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	21	-
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan D Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan da Pelaporan Data Pengendaliar Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolaha danPelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	21	-
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (K	Meningkatnya Akseptor KB Ak	Pesentaspeertumbuhan Akseptor KB Aktif	Jumlah N- N-1 -----X100% Jumlah N	Persen	2,5	435.096.800
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tersedianyaakseptor KB baru	Persentase Akseptor KB Bar	Jumlah akseptor KB yang terlayan -----X100% Jumlah PPM akseptor KB yang terlayani	Persen	100	42.312.500

Rencana Kerja 2025

2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKB	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	4	
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	16	
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	21	
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	4	30.000.000
2	14	03	2.01	13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	3	12.312.500
2	14	03	2.01	14	Advokasi Program Bangsa Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	1	

Rencana Kerja 2025

2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan (PKB/PLKB)	Tersedianya Kader IMP yang	Persentase Kader IMP yang Aktif	Jumlah Kader IMP yang Aktif ----- X100% Jumlah Kader IMP	Persen	100	209.840.000
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	2044	5.440.000
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	1	204.400.000
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusi Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Akseptor KB Aktif	Persentase Akseptor KB Aktif	Jumlah Peserta KB Aktif ----- X100% Jumlah PPM Peserta KB Aktif	Persen	80	182.944.300
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusi dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	72	-
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontras Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	3749	147.944.300
2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	5	5.000.000
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	7	30.000.000
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	72	-

Rencana Kerja 2025

2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Knesertaan B-eKRB	Terlaksananya kampung KB yang menjadi sasaran program KKBPK	Persentase kampung KB yang menjadi sasaran pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK	Jumlah Kampung KB yang menjadi sasaran pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK -----X-1-00% Jumlah Kampung KB	Persen	100	-
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sedki to Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	2	-
2	14	03	2.04	6	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	37	-
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Menurunnya Perkawinan Pertama Wanita Usia < 20 tahun	Persentase Perkawinan pertama wanita usia < 20 tahun	Jumlah Pasangan Usia Pertama Perkawinan Pertama Wanita Usia tahun tahun ini -----X-100% Jumlah Pasangan Usia Pertama Perkawinan Pertama Wanita Usia tahun tahun lalu	Persen	9,64	360.426.200
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok (BKB, BKR, BKL, PPPKS, P-I K dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang aktif	Jumlah Kelompok (BKB, BKR, BKL, PPPKS, P-I K dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang aktif -----X-100% Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, PPPKS, P-I K dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang aktif	Persen	100	141.047.300
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	4	141.047.300

Rencana Kerja 2025

							Keluarga)					
2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahter (PPKS)	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui P Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahter (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen	1	-	
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, -PRIK dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, -PRIK dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, -PRIK dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, -PRIK dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	30	-	
2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Tersedianya biaya operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kelompok	1015	-	

Rencana Kerja 2025

2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, P-RIK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, P-RIK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) $\times 100\%$	persen	100	219.378.900
2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, P-RIK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, P-RIK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, P-RIK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, P-RIK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	101	219.378.900
2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	3	0
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	1	-

Rencana Kerja 2025

2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan	1	-
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Tersedianya perangkat daerah yang memberikan pelayanan dengan SDM yang sudah mendapatkan pelatihan	Persentase PD yang melaksanakan kebijakan perlindungan tindak kekerasan pada perempuan	Jumlah PD dan lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan tindak kekerasan pada perempuan -----X100% Jumlah PD dan lembaga yang diadvokasi	Persen	100	69.302.500
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perangkat daerah yang aktif melaksanakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang aktif melaksanakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang aktif melaksanakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan ----- X100% Jumlah PD yang mendapatkan advokasi	Persen	100	18.254.450
2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	53	18.254.450
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan kasus tindak kekerasan pada perempuan sesuai SPM	Persentase kasus tindak kekerasan pada perempuan yang dilayani sesuai SPM	Jumlah laporan kasus tindak kekerasan pada perempuan ----- X100% Jumlah kasus tindak kekerasan pada perempuan yang dilayani	Persen	100	53.355.000
2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	42	45.105.000

Rencana Kerja 2025

2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota yang Memerl Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	Layanan	6	8.250.000
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM lembaga yang mampu menyediakan layanan perlindungan perempuan	Persentase SDM lembaga yang mampu menyediakan layanan perlindungan perempuan	Jumlah SDM lembaga layanan perlindungan perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan -----X100% Jumlah SDM lembaga layanan yang dilatih	Persen	100%	15.947.500
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Orang	55	15.947.500
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya Capaian Desa Layak Anak	Persentase Desa Layak Anak	Jumlah Desa Layak Anak yang Didapatkan -----X100% Jumlah Desa Layak Anak yang ditetapkan	Persen	100	147.234.500
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya lembaga pemerintah, non pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang melaksanakan pemenuhan hak anak	Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang melaksanakan pemenuhan hak anak	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang dilatih -----X100% Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang melaksanakan pemenuhan hak anak	Persen	100	119.630.500
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Maedddian Dunia Usaha	Organisasi	37	30.900.000

Rencana Kerja 2025

							Media dan Dunia Usaha				
2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	88.730.500
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Lembaga PHA yang terlatih	Persentase Lembaga PHA yang terlatih	Jumlah Lembaga PHA yang dilatih -----X-1-00% Jumlah Lembaga PHA yang ditetapkan	Persen	100	27.604.000
2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	27.604.000
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Terlaksananya layanan terhadap anak korban kekerasan	Persentase Kasus Tindak Kekerasan Pada Anak yang terselesaikan	Jumlah kasus tindak kekerasan yang dilayani secara komprehensif -----X-1-00% Jumlah kasus tindak kekerasan terhadap anak	Persen	100	92.231.000
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase institusi Pendidikan yang aktif melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak	Jumlah institusi Pendidikan yang aktif melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak -----X-1-00% Jumlah institusi Pendidikan	Persen	100	38.907.000
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Terlaksananya advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Orang	72	38.907.000

Rencana Kerja 2025

2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kasus tindak kekerasan pada anak	Jumlah layanan terhadap anak korban kekerasan -----X-1-00% Jumlah laporan kekerasan terhadap anak	Persen	100	53.324.000
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	25	45.074.000
2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Terlaksananya Layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang	6	8.250.000
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan anak yang aktif	Jumlah lembaga layanan anak yang aktif -----X100% Jumlah lembaga layanan anak yang ditetapkan	Persen	100	-
2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Terbangunnya kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kegiatan	20	-
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Penguatan Kapasitas SDM penyedia layanan AMPK	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	50	-
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan -----X100% Jumlah Kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang ditetapkan	Persen	73,33	296.106.500

Rencana Kerja 2025

2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Perangkat Daerah yang melaksanakan kelembagaan PUG	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kelembagaan PUG	Jumlah Perangkat Daerah dan Kecamatan yang Melaksanakan PUG -----X100% Jumlah Seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan	Persen	100	117.582.250
2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Koordinasi Perangkat Daerah OPD dan OPD Kecamatan	Dokumen	2	117.582.250
2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PU) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (UPG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Kecamatan	Perangkat Daerah	21	-
2	8	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PU) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Kecamatan yang mendapatkan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) yang ditetapkan	Perangkat Daerah	3	-

Rencana Kerja 2025

2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya lembaga perempuan yang melaksanakan pemberdayaan perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase lembaga perempuan yang melaksanakan pemberdayaan perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah lembaga perempuan yang melaksanakan pemberdayaan perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang dibina -----X100% Jumlah lembaga perempuan yang melaksanakan pemberdayaan perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang aktif	Persen	100	83.374.750
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam: 1. Bidang Politik 2. Bidang Hukum 3. Bidang Sosial 4. Bidang Ekonomi	Dokumen	4	83.374.750
2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan P. Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi di tingkat Kecamatan Hingga Desa	Organisasi	15	0
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya SDM lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Persentase SDM lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah SDM lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dibina -----X100% Jumlah SDM lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang aktif	Persen	100	95.149.500
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah Sumber Daya Lembaga / Anggota Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	2500	95.149.500

Rencana Kerja 2025

2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Jumlah rata-rata capaian kinerja aparatur yang terlaksana -----X-1-0-0% Jumlah rata-rata capaian kinerja aparatur yang ditetapkan	Persen	100	14.640.000
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun sesuai aturan -----X-1-0-0% Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang ditetapkan sesuai aturan	Persen	100	14.640.000
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	5	14.640.000
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Jumlah rata-rata capaian kinerja aparatur yang terlaksana -----X-1-0-0% Jumlah rata-rata capaian kinerja aparatur yang ditetapkan	Persen	100	4.782.034.406
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun sesuai aturan -----X-100% Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang ditetapkan sesuai aturan	Persen	100	15.951.193

Rencana Kerja 2025

2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	15.951.193
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Peran Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Jumlah laporan keuangan yang tersusun dan pencairan gaji yang dicairkan sesuai aturan X-1-0-0% Jumlah laporan keuangan yang tersusun dan pencairan gaji yang dicairkan yang ditetapkan	376	100	3.742.494.376
2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	28	3.537.560.626
2	14	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	17	3.699.750
				2.08.01.2.02.0001	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	4	201.234.000
2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang tersedia X100% Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang ditetapkan	Orang	19	12.600.000
2	14	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	19	12.600.000

Rencana Kerja 2025

2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi U Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan -----X-1-0-0%	Persen	301.759.200
2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instal Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	2.264.950
2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	76	59.193.250
2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	96.800.000
2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	18.550.000
2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	4.704.000
2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	120.247.000
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan -----X-1-0-0%	Persen	100	368.680.000
2	14	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.200.000
2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	112.080.000
2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	254.400.000

Rencana Kerja 2025

2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penuh Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara -----X-1--0-0% Jumlah Barang Milik Daerah Penuh Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan	Persen	100	340.549.637
2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayar Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasi atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	124	191.000.000
2	14	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	37.621.637
2	14	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	106	62.850.000
		01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	49.078.000

Total anggaran Sub Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang Tahun 2024 pada dialokasikan Anggaran Belanja langsung sebesar Rp. **20.619.591.573,-** (Dua Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

BAB V
P E N U T U P

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Jombang tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan harus sebagai acuan untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Jombang. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Perangkat Daerah yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan jangka pendek.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Jombang tahun anggaran 2024, penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jombang akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu juga renja SKPD sebagai acuan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Jombang tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) 2024 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Jombang Tahun

- 2024 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlebitan masyarakat, dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
 3. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.
 4. Perubahan Renja perangkat daerah, di dalam proses penyusunan harus memperhartikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
 5. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Jombang Tahun 2024, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diikuti dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijaksanaannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

4. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
5. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintah.
6. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
7. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
8. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
9. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
10. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Jombang, 9 Juli 2024.

**KEPALA DINAS PPKB, PPPA
KABUPATEN JOMBANG**



dr. PUDJI UMBARAN, M.Kp
Pembina Utama Muda
NIP. 196804102002121006